

**PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Deswandi

NPM. 1451010163

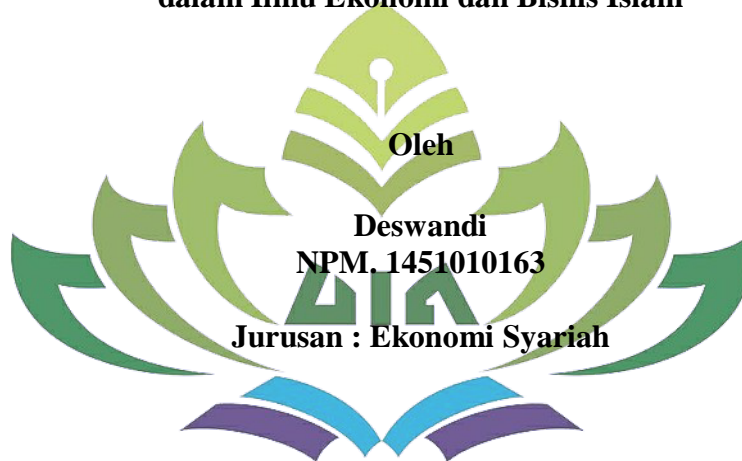
Jurusan : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : H.Supaijo, S.H., M.H

Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak – banyaknya, keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka panjang. Telah banyak program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, salah satunya dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat di desa dengan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program – program dari pemerintahan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang?, dan bagaimana pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang, dan mengetahui pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Ketapang, dalam pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menganalisis data dengan metode deduktif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan, pelaksanaan ADD 2017 terhadap pendapatan masyarakat, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 10 tentang alokasi dana desa, yang mana 70% dari ADD digunakan untuk pembangunan desa dan 30% digunakan untuk operasional pemerintahan desa, tetapi sebaliknya 70% digunakan untuk operasional desa dan 30% untuk pembangunan desa, sehingga dampak ADD belum bisa dirasakan secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena pelaksanaan yang kurang terprogram. Pelaksanaan ADD 2017 terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam, sesuai dengan nilai dasar Ekonomi Islam, *keadilan*, kurangnya keadilan dalam penetapan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja yang seharusnya lebih prioritas, *tanggung jawab* kurangnya rasa tanggung jawab atau amanah dari perangkat desa yang tidak sesuai dengan program kerja yang diajukan ke pemerintah pusat, *takaful (jaminan sosial)*, kurangnya hubungan baik atau partisipasi masyarakat dengan perangkat desa dalam menentukan program sehingga tidak tercapainya *falah* (kemaslahatan) terhadap pendapatan masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarampe, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA
DESA (ADD) 2017 TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada
Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : Deswandi

NPM : 1451010163

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**


Pembimbing I

Pembimbing II


H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP. 196503141994031002


Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**


Madnasir, S.E., M.Si.
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarama, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** disusun oleh : Deswandi, NPM : 1451010163, Program Studi : Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang monaqosyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at / 08 Juni 2018

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Ahmad Habibi, S.E., M.E. (.....)

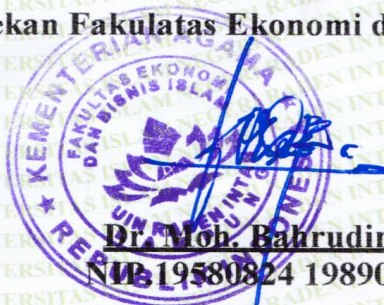
Sekretaris : Dinda Fali Rifan, M.Ak (.....)

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.Si (.....)

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.A

NIP.19580824 198903 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. An-Nisa:58)”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberi perlindungan, kesehatan jasmani dan rohani, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sarwono dan Ibu Lilis Sumawati. Yang aku hormati dan aku sayangi. Selalu memberikan yang terbaik untukku dengan sepenuh jiwa raganya. Yang selalu menyayangi, mengasihi, memberi motivasi dan nasehat-nasehat yang sungguh berarti hingga skripsi ini selesai. Kesabaran, pengorbanan, dan kasing sayangnnya takkan ada yang dapat menggantikan. Tanpa beliau aku tak bisa seperti ini. Terimakasih pak, mak yang terus mendo'akan untuk kebahagiaanku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkah, Aamiin.
2. Adik-adiku yang tersayang, Widi Febriani, Devin Arisandi, Maghfira Zhifa Aulia, yang selama ini selalu memberikan senyuman manis sebagai motivasiku sehingga aku bisa semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam A 2014 dan seluruh angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat dan ikatan ukhuwah akan selalu ditanamkan didiri kita.

4. Sahabat FoSSEI, UKM-F RISEF yang aku banggakan. Yang selama ini memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berarti. Ekonom Rabbani Bisa!!! Objektif, Komunikatif, Edukatif.
5. Untuk seseorang yang kelak akan menjadi makmum serta Ibu dari anak – anakku, sengaja aku persembahkan karya ini untukmu, semoga kamu bahagia hidup bersamaku.



RIWAYAT HIDUP

Dilahirkan di Desa Karang Sari Ketapang pada tanggal 08 Desember 1994.

Anak pertama dari 4 bersaudara pasangan bapak Sarwono dan Ibu Lilis Sumawati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Dimulai pada tahun 2001 – 2007 penulis bersekolah di SD N 2 Karang Sari
2. Tahun 2007 – 2010 penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP N 1 Ketapang
3. Tahun 2010 – 2013 penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA NURUL ISLAM Bandar Lampung
4. Tahun 2013 penulis mengambil kursus pelatihan Akomodasi Perhotelan di Kridawisata Bandar Lampung
5. Tahun 2014 dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kucurahkan kepada Sang Pecipta, Sang pemilik Cinta, Allah SWT. Jika tanpa kuasa-Nya penulis tidak akan mapu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW manusia yang mengajarkan kepada umat manusia betapa indahnnya iman dan islam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesain skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa
2. Madnasir,S.E.,M.Si, Deki Firmansyah,S.E.,M.Si, selaku ketua dan sekertaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. H. Supaijo,S.H.,M.H, Yulistia Devi,S.E.,M.S.Ak selaku Pembimbing I dan II yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan, nasehat, motivasi yang sangat berarti sehingga penulisan skripsi ini selesai
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang

bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut yang telah memberikan informasi, data referensi, dan lain-lain.

5. Bapak Abdullah selaku Sekertaris Kecamatan Ketapang dan seluruh Kepala Desa, aparatur desa serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ketapang yang telah memberikan dukungan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya di bidang khasanah Ekonomi Islam.



Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

Deswandi
NPM 1451010163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Tinjauan Pustaka	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam	24
1. Pengertian Ekonomi Islam	24
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam	26
3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	27
4. Nilai-nilai, Prinsip dan Tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam	28
B. Ekonomi	32
1. Pengertian Ekonomi	32
2. Pengertian Sistem Ekonomi	33
3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi	34
4. Kebijakan Ekonomi.....	36
C. Belanja Negara	37
1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil)	37
2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)	37
3. Alokasi Dana Desa	42
D. Konsep Pendapatan	45

1. Pengertian Pendapatan	45
2. Sumber Pendapatan	45
3. Pendapatan Dalam Islam	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Ketapang	51
2. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Ketapang.....	52
3. Kondisi Demografis Kecamatan Ketapang	52
B. Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Ketapang	57
C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2017 di Kecamatan Ketapang	59
D. Hasil Wawancara	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Program ADD 2017 Terhadap Peningkatan pendapatan Masyarakat.....	75
B. Pelaksanaan Program ADD 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam ...	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Rata-rata Penduduk di Kecamatan Ketapang.....	10
Tabel 1.2 Jumlah Populasi Penelitian.....	17
Tabel 1.3 Jumlah Sampel Penelitian.....	19
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ketapang.....	53
Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Agama.....	54
Tabel 3.3 Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah.....	55
Tabel 3.4 Fasilitas Berdasarkan Lembaga Pendidikan.....	56
Tabel 3.5 Sarana Kesehatan.....	56
Tabel 3.6 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2016.....	58
Tabel 3.7 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017.....	59
Tabel 4.1 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2016.....	83
Tabel 4.2 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 3 Surat Izin Pra Riset dari Desa Karang Sari
- Lampiran 4 Pengajuan Pergantian Judul dan Objek Penelitian
- Lampiran 5 Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 6 Surat Izin Riset dari Kecamatan Ketapang
- Lampiran 7 Lembar Keputusan Dekan
- Lampiran 8 Daftar Wawancara
- Lampiran 9 Daftar Foto
- Lampiran 10 Profil Kecamatan Ketapang
- Lampiran 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, dihapakan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul. **“PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA KECAMATAN KETAPANG LAMPUNG SELATAN)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci atau proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).¹

¹ Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan keempat, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011, h. 774.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa palih sedikit 10% (sepuluh persen).²

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.³

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan juga takaful (jaminan social).⁴

Berdasarkan penjelasan istilah–istilah diatas dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan judul ini adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan program ADD 2017 di Kecamatan Ketapang

²Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang bulat dan utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 133.

³Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta:Raja grafindo persada, 2006), h. 47.

⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), h. 62-63.

Lampung Selatan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak – banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya, dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Telah banyak program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, salah satunya dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat di Desa dengan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 10 tentang belanja alokasi dana desa, penggunaan ADD 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dengan membuka lapangan usaha baru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini alokasi dana desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

2. Alasan Subjektif

Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literatur yang baik

primer maupun sekunder dan penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan social, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat.⁵

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.⁶

⁵ Loncolin Arsyad, *Ekonomi pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2015), h. 31

⁶ Sadono Sudirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga penerbit fakultas Ekonomi UI dan bina grafika, 2000) h. 14.

Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberi partisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan.⁷

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan Negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD) dan Pembangunan Desa (BangDes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol '*Pemberdayaan Masyarakat Desa* (PMD)'. Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (*penyeragaman*) oleh pemerintahan pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan

⁷Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *botten-up* atau kombinasi *top-down* dan *botten-up*. Program peembangunan desa bersifat *botten-up* tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA).⁸

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Proses desentralisasi yang berlangsung yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada

⁸ Rosnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Kecamatan Negeri Besar*, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lmapung, 2015), h. 30.

pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.⁹

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

⁹ Akbar Prabawa, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggarongseberang Kutai Karta Negara”. Jurnal Ilmu Pemeritah, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015).

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program alokasi dana desa di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan diberikan kepada 17 desa, yang berjumlah 14.390 KK. Kondisi perekonomian di Kecamatan Ketapang didominasi pada sektor pertanian (70%), dan lainnya merupakan pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan (30%).

Dalam pelaksanaannya besaran ADD tersebut dapat digunakan dalam peningkatan pendapatan masyarakat diantaranya: membangun infrastruktur yang memudahkan masyarakat dalam akses distribusi hasil pertanian ataupun membuat ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual.

Dana yang dialokasikan ke setiap desanya pada tahun 2016, berkisar antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan Rp. 390.000.000,- per tahun, dan pada tahun 2017 meningkat berkisar antara Rp. 390.000.000,- sampai dengan Rp. 440.000.000,- sudah termasuk untuk anggaran aparatur desa.¹⁰

¹⁰Abdullah (Sekertaris Camat Ketapang), *Wawancara dengan penulis*, Ketapang, 06 Februari 2017.

Adapun data awal besaran pendapatan masyarakat dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Ketapang terkait dengan program ADD 2016 – 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pendapatan Rata-rata Penduduk di Kecamatan Ketapang

	Desa	Pendapatan Tahun 2016	Pendapatan Tahun 2017
1	Karang Sari	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
2	Sri Pendowo	Rp. 1.600.000	Rp. 1.700.000
3	Kemukus	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
4	Bangun Rejo	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
5	Taman Sari	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000

Sumber: data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pendapatan masyarakat di Desa Kemukus tidak mengalami kenaikan masih tetap seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (2017) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa 2017 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa 2017 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pelaksanaan program alokasi dana desa 2017 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan.
- b. Menganalisis pelaksanaan program alokasi dana desa 2017 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar dapat tambahan literatur dan referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu tentang Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang
- 2) Bagi Aparatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa
- 3) Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pendapatan masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara tepat untuk melakukan suatu dengan menggunakan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah memikirkan yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan

¹¹M. Ahmad Anwar, *prinsip-prinsip metodologi research*, (Yogyakarta:Sumbangsih, 2000) h. 2.

pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian dalam kancan sebenarnya.¹³ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapngan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Kecamatan Ketapang.

Selain peneletian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Reseach*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi denagn bantuan materal, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pendapatan mayarakat.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitain yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

¹³ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁴

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang penulis maksud adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Ketapang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data secara langsung dari masyarakat dan aparat desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Ketapang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: AL-Qur'an, Hadist, Buku-buku, Internet dan sebagainya.

¹⁴ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 208.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah Kecamatan Ketapang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya yang tepat.¹⁶

Interview sebagai suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan suara dengan telinga sendiri, merupakan alat

¹⁵ I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, adisi 1,2015), h. 52.

¹⁶ Abdurahmat Fathoni, *Op.Cit.*, h. 105

informasi langsung untuk berbagai jenis data-data social, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang *memanifies*.¹⁷

Penentuan sumberdata kepada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut.¹⁸Yaitu aparaturnya desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Ketapang.

Penulisan menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat sekitar Kecamatan Ketapang.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁹Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari berbagai media.

¹⁷ *Ibid.*, h. 105-106

¹⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 216

¹⁹ Abdurahmat Fathoni, *Op.Cit.*, h. 112

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian merupakan keseluruhan objek penelitian.²⁰

Populasi dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Populasi Penelitian

N0	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Tokoh Masyarakat
1	Ketapang	15 orang	15 orang
2	Legundi	16 orang	15 orang
3	Bangun Rejo	12 orang	14 orang
4	Tri Dharmayoga	10 orang	12 orang
5	Sri Pendowo	10 orang	10 orang
6	Karang Sari	17 orang	15 orang
7	Sumber Nadi	9 orang	8 orang
8	Pematang Pasir	10 orang	10 orang
9	Ruguk	20 orang	16 orang
10	Sidoasih	10 orang	12 orang
11	Sumur	16 orang	15 orang
12	Sidoluhur	10 orang	11 orang
13	Wai Sidomukti	10 orang	12 orang
14	Berundung	10 orang	13 orang
15	Taman Sari	11 orang	13 orang
16	Lebung Nala	10 orang	10 orang
17	Kemukus	11 orang	12 orang
	Jumlah	207 orang	213 orang

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

²⁰ *Ibid.*, h. 103

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari aparaturnya desa 207 orang, tokoh masyarakat berjumlah 213 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian yaitu 420 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil sampel yang diteliti.²¹ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²²

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *sampling non random* atau *sample nonprobabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.²³ Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

²¹ *Ibid.*, h. 103

²² Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 116

²³ M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 91

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.²⁴

Dari 420 orang yang dijadikan populasi tapi karena keterbatasan penulis dalam mengelola data. Maka, penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk di olah. Tetapi untuk objektifitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel setiap desa yaitu aparatur desa, tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat. Sampel ini diambil karena perencanaan program alokasi dana desa merupakan hasil, dari kesepakatan antara aparatur desa dengan tokoh masyarakat, oleh karena itu sampel diambil, dapat dilihat tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Sampel Penelitian

N0	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Tokoh Masyarakat
1	Ketapang	2 orang	2 orang
2	Legundi	2 orang	2 orang
3	Bangun Rejo	2 orang	2 orang
4	Tri Dharma Yoga	2 orang	2 orang
5	Sri Pendowo	2 orang	2 orang
6	Karang Sari	2 orang	2 orang
7	Sumber Nadi	2 orang	2 orang
8	Pematang Pasir	2 orang	2 orang
9	Ruguk	2 orang	2 orang
10	Sido Asih	2 orang	2 orang
11	Sumur	2 orang	2 orang
12	Sido Asih	2 orang	2 orang

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 2

13	Wai Sidomukti	2 orang	2 orang
14	Berundung	2 orang	2 orang
15	Taman Sari	2 orang	2 orang
16	Lebung Nala	2 orang	2 orang
17	Kemukus	2 orang	2 orang
	Jumlah	34 orang	34 orang

Sumber: data diolah 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 64 orang responden.

6. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti didalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.²⁵

²⁵ Moersaleh dan Musanaf, pedoman pembuatan skripsi, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), h.

7. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Analisis data ini menggunakan Miles dan Huberman. Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni

²⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 2

berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²⁷

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.²⁸ Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi akurat yang diperoleh dari masyarakat setiap dusun yang ada di desa Karang Sari dengan aparatur desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari data dan teori yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa 2017 dan Pendapatan Masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah dengan tema ADD dan Pendapatan dan sejenisnya ada beberapa penulis temuan, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Kecamatan Negeri Besar. Karya Rosnawati, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tahun 2015. Dimana

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach, jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 42

²⁸ Kartino Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.

fokus kajiannya pada masalah bagaimana dampak positif dan negatif ADD terhadap kesejahteraan pada Kecamatan Negeri Besar.

2. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: PP RI Nomor 22 tahun 2015, PMK RI Nomor 93 tahun 2015, PP RI Nomor 45 tahun 2015, SKB 3 Menteri tahun 2015. Fokus kajian penelitian ini adalah kurangnya pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Jurnal Akbar Prabawa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Karta Negara, Jurnal Ilmu Pemerintah, Desember 2015. Fokus kajian yaitu pada pengelolaan ADD dalam pembangunan Desa.
4. Jurnal Riset Akuntansi Riset Going Concern 12(1), 2017, 83-90, Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo, Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. Fokus Kajian dampak ADD terhadap peningkatan pembangunan Desa.
5. Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No 2 November 2012, H. Muhammad Rusydi, Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. Fokus kajian ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam.

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain:

- a. Monzer Kafh (1978) mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muhammad Abdul Mannan (1992), mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-Masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW, ijma, dan qiyas
- d. Umar Chapra (1981) mengartikan ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan

melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.

- e. M. Nejatullah Sidiqqi (1985) mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.¹

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:



Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS.Al-Baqarah:30)

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 11

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum Ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur'an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri.²

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS.An-Nisa:80)

ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

² Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: <http://Islam.cendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur'an>. (07 maret 2018)

3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat.³

Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem Ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah:8)

Islam memberi penjelasan tentang keadilan dalam segala hal. Karena adil lebih dekat dari takwa.

³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

4. Nilai-Nilai, Prinsip dan Tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mempunyai dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai, prinsip dan tujuan dasar dalam Ekonomi yakni:⁴

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl:90)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara Hak dan Kewajiban mereka.

⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, h. 62

2) Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa:58)

Ayat di atas menegaskan bahwa, amanah tidak hanya menyangkut tentang urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik saja. Kata-kata adalah amanah, memperlakukan insan dengan baik itu juga amanah. Amanah merupakan tuntunan Iman dan khianat adalah salah satu kekafiran.

Sabda Rasulullah SAW menegaskan:

“Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

3) Tafakul (*jaminan jawab sosial*), adanya tanggungjawab sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah:195)

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih ketika telah ditunaikannya tanggungjawab sosial. Dalam ayat lain juga Allah juga telah melarang bagi manusia yang menimbun harta kekayaan, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara mereka.

Selain tiga prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi islam, yakni: kerja, efesiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Sistem Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah.

Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak member tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syari'ah akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang dunia yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.⁵

Menurut Abdul Manan (1993), landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep *fundamental*, yaitu keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*), kepemimpinan (*khalifah*), dan keadilan (*a'dalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (*abudillah*) *mahdah* (berkat sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (*mu'amalah*), *muasyarah*, hingga *akhlak*.⁶

Ekonomi yaitu bagian dari *mu'amalah* secara umum dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang

⁵ *Ibid.*, h. 67

⁶ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, h. 4

harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *al-falah*.⁷

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan kebijakn-kebijakn berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.⁸

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi. Tak terkecuali masalah ADD yang merupakan salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi dana desa, sehingga tercipta keadilan sosial di masyarakat secara luas.

B. EKONOMI

1. Pengertian Ekonomi

Menurut M. Manulung, Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran

⁷ *Ibid.*, h. 6

⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, h. 53

(kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).⁹

Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.¹⁰

Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi menurut Kyoto Serdan sebagai organisasi sosial yang terdapat didalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Menurut Jhon F. Due sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi secara khusus. Suatu sistem akan mempengaruhi pola pikir dan bertindak

⁹Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, (Bogor: perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013, h. 4.

¹⁰ Pratama Raharja, *et.al*, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3

masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat.¹¹

Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan. Sedangkan instansi (lembaga) dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹²

Dengan demikian sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang menetap dan teratur. Dalam sistem ekonomi, dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.¹³

3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam ekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan

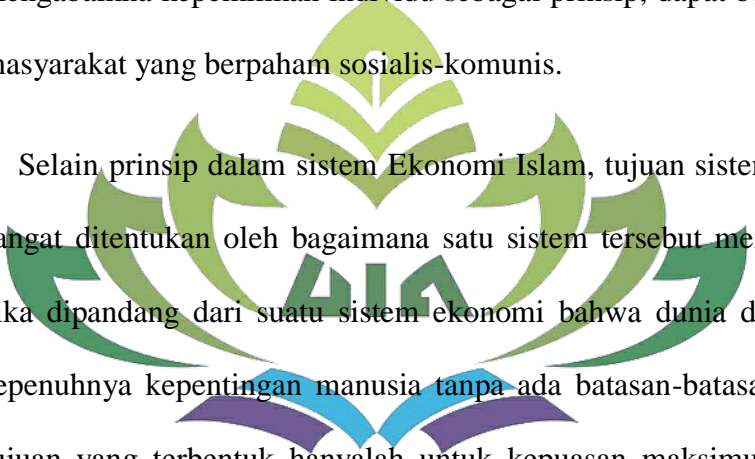
¹¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51

¹² *Ibid.*, h. 52

¹³ Tulu T.H. Tambunan, *Op.Cit.*, h. 2.

oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham liberalis. Begitu juga pada sistem sosialis yang menjadikan kolektivitas serta mengabaikan kepemilikan individu sebagai prinsip, dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham sosialis-komunis.



Selain prinsip dalam sistem Ekonomi Islam, tujuan sistem ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem tersebut memandang dunia. Jika dipandang dari suatu sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka tujuan yang terbentuk hanyalah untuk kepuasan maksimum sebagaimana yang terjadi pada ekonomi kapitalis.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem Ekonomi Islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai

permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.¹⁴

4. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik), begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi yang masuk kebijakan sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h. 35

¹⁵ *Ibid.*, h. 54

C. Belanja Negara

1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil)

Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, peraturan presiden, dan peraturan menteri keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini harus dinamis, perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian,

karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko ditanggung itu relative kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan¹⁶.

Program dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas – asas serta usulan – usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek – proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek – proyek.

Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola – pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi – energi dan sumber – sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern.

Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.

dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dari pada pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan.¹⁷

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber – sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

(1) program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi selain mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi ruang lingkup,

¹⁷ Abu Uswah Abdurrahmah, "perencanaan Dalam Kaidah Islam" (on-line), tersedia di: <https://islamisonewordpress.com>, (14 April 2018)

isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam – macam:

a. Ruang Lingkup

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.

b. Ukuran

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.

c. Durasi

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.

d. Kejelasan dan Spesifikasi Program Input

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara eksternal terdapat program – program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang – kadang sulit untuk digambarkan.

e. Kompleksitas Tujuan

Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

f. Kebaruan Program

Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program menurut Kuncoro memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok – kelompok sasaran dengan apa yang di tawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang di tawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.
- b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan – keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorongf keterlibatan semua potensi, seperti partoisipasi jaringan kerja dan keadilan. Program ADD merupakan salah

satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Implementasi Program Pemerintah yang Tertuang UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa.

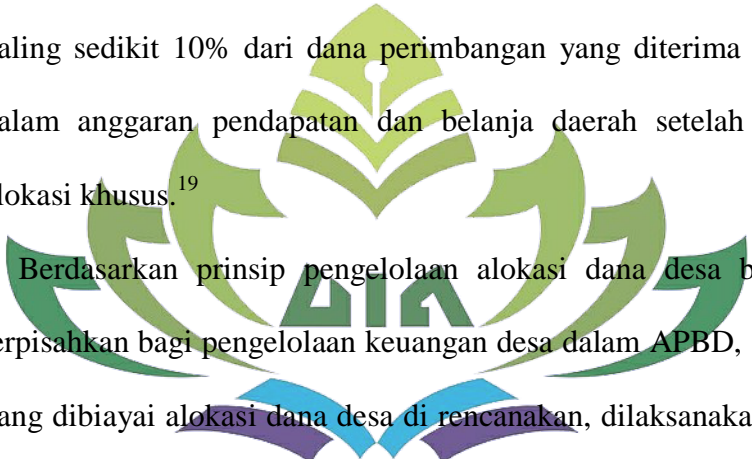
Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBD.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-undang No 8 tahun 2016 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10% setelah

dikurangi dana alokasi khusus.¹⁸ Dibagi untuk setiap desa secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹⁹



Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

Sedangkan mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu:

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 & 4

¹⁹ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan dasar hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dan desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan dan (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas Kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh kepala desa
 - 3) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.

- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibubukan kedalam buku harian (umum) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

D. Konsep Pendapatan

Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, penghasilan seseorang tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja orang tersebut, yang pada gilirannya tergantung dari kemampuan alami, modal manusia, diferensial kompensasi, diskriminasi dan seterusnya

1. Pengertian Pendapatan

Secara etimologi pendapatan masyarakat berasal dari dua suku kata yakni pendapatan dan masyarakat. Pendapatan adalah imbalan atau hasil dari kerja (usaha dan sebagainya).²⁰ Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat yang memiliki suatu adat dan budaya atau kebiasaan yang sama.

Geeyary Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan, yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi dari perusahaan.

2. Sumber Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga yakni, (1) dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja

²⁰ Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pusat, 2011, h. 193

(2) dari hak milik seperti modal dan tanah, (3) dari pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerja (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan (berbahaya, mengasikan, glamor, sulit, dan sebagainya). Pendapatan rumah tangga juga beragam menurut jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah properti yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak secara eksklusif ditujukan kepada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum untuk memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan.²¹

Pada dasarnya perekonomian secara keseluruhan itu merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi di berbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya akan relatif mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perawatan

²¹ Karl E. Case, Ray. C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*, Erlangga Jakarta, 2007, h. 445

kesehatan yang lebih bermutu, mobil yang lebih indah, pesiar lebih sering ke berbagai tempat, dan sebagainya.²²

3. Pendapatan Dalam Islam

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.²³

²² *Ibid.*, h. 446

²³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007), h. 132.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikan sebagai kewajiban terhadap orang-orang yang mampu.

lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97.

حَسَنَ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبَ حَيَوةً فَلَنَحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ تَنَزَّلُ أَوْذَكَرِّمِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَابِأ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS.An-Nahl:97).²⁴

Al-Quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing.

Allah berfirman dalam QS.Al-Balad (90) ayat 4:

كَبَدْنِي الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (QS.Al-Balad:4).²⁵

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada seseorang pekerja,

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 378.

²⁵ *Ibid.*, h. 894.

pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.²⁶

Pendapatan rumah tangga yang satu beda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester tergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokok berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan atau setiap bulan.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

²⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFI, 2005), h. 313.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada seorang suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelajaran rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain sulit diperkirakan. Adalah keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah tangga untuk membantu suami dan anak-anaknya dalam memperkirakan pendapatan-pendapatan itu agar seimbang dengan pengeluaran.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Ketapang

Kecamatan Ketapang pertama kali dibentuk sebagai Kecamatan Perwakilan Ketapang, dipimpin oleh Sumardi 1991. Definitifnya Kecamatan Ketapang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 42 tanggal 12 Desember 2000, dan diresmikan pada tanggal 22 februari 2001 oleh Zulkifli Anwar sebagai Bupati Lampung Selatan. Sejak defenitif, Kecamatan Ketapang pertama kali dipimpin oleh Dra. Yurita R.

Kecamatan Ketapang terdapat makam Al Habib Alwi bin Alwi Al Idrus atau sering disebut juga Sayidina Ali (Said Ali) Yang terletak di areal Masjid Desa Ruguk. Ada pula sebuah makam yang disebut orang Keramat Gajah Mada. Makam-makam tersebut sering didatangi wisatawan, terutama wistawan domestik, baik dari dalam maupun dari luar Propinsi Lampung untuk berziarah.

Pada awal tahun 2013, tepatnya di bulan Maret, Kecamatan Ketapang mengalami pemekaran desa. Desa Wai Sidomukti secara resmi defenitif

memekarkan diri dari Desa Pematang Pasir. Hingga saat ini, Kecamatan Ketapang terdiri dari 17 Desa.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Ketapang

Kecamatan Ketapang merupakan daerah tropis seperti daerah lain di Indonesia. Dengan bentuk wilayah memanjang dari selatan ke utara, memiliki garis pantai sepanjang ± 30 kilometer dengan luas daratan 186,60 km² atau 18.660 hektar. Ketinggian rata-rata wilayah di Kecamatan Ketapang adalah 37,94 mdpl, dengan daratan terendah mencapai 3 mdpl dan daratan tertinggi mencapai 200 mdpl (diukur dari pusat desa GPS : Global Positioning System).

Pusat pemerintahan Kecamatan Ketapang terletak di Desa Bangun Rejo dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sragi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakauheni dan Selat Sunda
- c. Sebelah Barta berbatasan dengan Kecamatan Penengahan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

3. Kondisi Demografis Kecamatan Ketapang

- a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Ketapang terdiri dari 51.949 (lima puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah kepala

keluarga 14.390 (empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh) KK yang terdiri dari 26.165 (dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima) laki-laki dan 25.784 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) perempuan. Adapaun desa yang termasuk di Kecamatan Ketapang yaitu:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Ketapang

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LK	PR	
1	Sidoasih	714	1.170	1.180	2.350
2	Sumber Nadi	300	607	597	1.204
3	Sri Pendowo	871	1.588	1.547	3.135
4	Legundi	852	1.742	1.564	3.306
5	Taman Sari	807	1.549	1.612	3.161
6	Sidoluhur	431	845	774	1.619
7	Ruguk	1.596	3.025	2.913	5.938
8	Sumur	1.463	2.632	2.510	5.142
9	Pematang Pasir	1.150	2.145	2.046	4.191
10	Lebung Nala	407	680	702	1.382
11	Tri Darmayoga	330	715	712	1.427
12	Kemukus	625	895	932	1.827
13	Wai Sidomukti	471	894	864	1.758
14	Karang Sari	1.096	1.799	1.614	3.413
15	Ketapang	1.897	3.538	3.922	7.460
16	Bangun Rejo	776	1.319	1.292	2.611
17	Berundung	604	1.022	1.003	2.025
JUMLAH		14.390	26.165	25.784	51.949

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

b. Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk berdasarkan Agama dan tempat ibadah di Kecamatan

Ketapang dapat dilihat tabel 3.2 dan 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.2

Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Presentase
1	Islam	80,5%
2	Khatolik	3%
3	Protestan	1%
4	Hindu	15%
5	Budha	1,5%

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

Tabel 3.3

Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	69
2	Langgar/Mushola	109
3	Gereja	5
4	Pura	29
5	Vihara/Klenteng	2

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

c. Lembaga Pendidikan

Kecamatan Ketapang memiliki lembaga pendidikan sebanyak dari tingkat PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, TPA dan Pondok pesantren pun aktif di Kecamatan ini total memiliki lembaga pendidikan sebanyak 70 lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Fasilitas Berdasarkan Lembaga Pendidikan

No	Tingkatan Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK/PAUD	1	12	13
2	SD/MI	28	7	35
3	SMP/MTS	4	8	12
4	SMA/SMK/MA	2	3	5
5	PONPES	-	5	5
Jumlah		35	35	70

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

d. Sarana Kesehatan

Kecamatan Ketapang memiliki sarana kesehatan sebanyak 56 dari 17 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Sarana Kesehatan

No	Jenis prasarana	Jumlah
1	Puskesmas induk	1
2	Puskesmas pembantu	5
3	Puskesmasdes	11
4	Posyandu	39
Jumlah		56

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ketapang 2017

e. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan di dominasai pada sektor Pertanian 70% (tujuh puluh persen) dan lainnya merupakan pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan (30%). Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani jagung.

Sedangkan masyarakat yang menjadi buruh tani hanya mendapat penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dibidang Ekonomi, masih sedikitnya lembaga perekonomian di wilayah Kecamatan Ketapang yang terkait seperti: perdagangan, jasa dan industri kecil, atau UMKM, kurangnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat, perlu adanya upaya dalam usaha-usaha untuk jasa, perdagangan, industri kecil dan menengah di hadapan khusus di Kecamatan Ketapang.

B. Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Ketapang

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga atau pendapatan anggota rumah tangga lainnya. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: pangan, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Masyarakat Kecamatan Ketapang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan di Kecamatan Ketapang memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk bercocok tanam, sebagai besar masyarakat menanam Jagung sebagai sumber pendapatan.

Adapun besaran pendapatan masyarakat Kecamatan Ketapang menurut profesi sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2016

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.000.000 – Rp. 1.600.000
2	Buruh	Rp. 500.000 – Rp. 1.200.000
3	Pedagang	Rp. 800.000 – Rp. 1.800.000

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016.:

Tabel 3.7
Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.000.000 – Rp.1.800.000
2	Buruh	Rp. 500.000 – Rp.1.400.000
3	Pedagang	Rp. 800.000 – Rp.1.900.000

Sumber: Data diolah 2018

Dari kedua tabel di atas menunjukan alokasi dana desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang kurang baik dalam perencanaan program dan pengelolaannya.

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Di Kecamatan Ketapang

Pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Ketapang dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris desa sebagai ketua pelaksanaan program untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaan di masing-masing desa:

1. Sidoasih

Luas wilayah di Desa Sidoasih 421 Ha, dengan jumlah penduduk 2.350 jiwa, dan 714 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.405.704.650,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Sidoasih, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai tunjangan kesehatan, pakaian olahraga, dan kesehatan sebanyak Rp.263.708.022,- atau sebesar 65%, dan hanya Rp.141.996.627,- atau 35% untuk PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala Desa Sidoasih dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Lampung Selatan.

2. Sumbernadi

Luas wilayah di Desa Sumbernadi 550 Ha, dengan jumlah penduduk 1.204 jiwa, dan 300 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.397.479.240,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Sumbernadi ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk pembangunan Insfrastruktur dan kegiatan ekonomi desa sebesar Rp.298.109.430 atau sebesar 75%, dan untuk belanja pegawai dan operasional BPD, RT, RW sebesar Rp.99.369.810 atau sebesar 25%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Sumbernadi dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

3. Sri Pendowo

Luas wilayah di Desa Sri Pendowo 540 Ha, dengan jumlah penduduk 3.135 jiwa dan 871 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.408.412.820,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Sri Pendowo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan kepala desa dan perangkat desa Rp.102.103.205,- atau sebesar 25%, belanja modal, PKK, dan LPM, seta penyelenggaraan kegiatan Rp.306.309.615,- atau sebesar 75%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Sri Pendowo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

4. Legundi

Luas wilayah Desa Legundi 1.179 Ha, dengan jumlah penduduk 3.306 jiwa dan 852 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.429.200.666,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Legundi ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.257.520.399 atau sebesar 60%, belanja modal, pemangunan gorong-gorong sebesar Rp.171.680.266 atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Legundi dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

5. Taman Sari

Luas wilayah di Desa Taman Sari 650 Ha, dengan jumlah penduduk 3.161 jiwa dan 807 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.417.232.616,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Taman Sari ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk tunjangan operasional BPD, operasional RT, RW dan tunjangan kepala desa sebesar Rp.125.169.784,- atau sebesar 30%, PKK dan LPM, belanja Modal, dan perencanaan desa sebesar Rp.292.062.831,- atau sebesar 70%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada desa Taman Sari dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

6. Sidoluhur

Luas wilayah di Desa Sidoluhur 750 Ha, dengan jumlah penduduk 1.619 jiwa dan 431 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.404.013.620,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Sidoluhur ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.242.408.620,- atau sebesar 60%, tunjangan operasional, PKK, LPM, penyelenggaraan perencanaan desa, pembangunan air bersih, pembiayaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp.161.605.448,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Sidoluhur dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

7. Ruguk

Luas wilayah di Desa Ruguk 3.250 Ha, dengan jumlah penduduk 5.938 jiwa dan 1.596 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.441.326.780,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Ruguk ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka

perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.264.796.068,- atau sebesar 60%, belanja modal, pembangunan rebet beton, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembiayaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama sebesar Rp.176.530.712,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Ruguk dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

8. Sumur

Luas wilayah di Desa Sumur 2.155 Ha, dengan jumlah penduduk 5.142 jiwa dan 1.463 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.441.495.388,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Sumur ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, biaya listrik serta penggantian ban dinas sebesar Rp.309.046.771,- atau sebesar 70%, belanja modal, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan peningkatan kader posyandu sebesar Rp.132.448.616,- atau sebesar 30%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Sumur dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

9. Pematang Pasir

Luas wilayah di Desa Pematang Pasir 779 Ha, dengan jumlah penduduk 4.191 jiwa dan 1.150 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.415.810.107,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Pematang Pasir ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan operasional perkantoran dan listrik sebesar Rp.395.019.601,- atau sebesar 95%, pembangunan gorong – gorong Rp.20.790.505,- atau sebesar 5%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Pematang Pasir dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

10. Lebung Nala

Luas wilayah di Desa Lebung Nala 450 Ha, dengan jumlah penduduk 1.382 jiwa dan 407 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.399.437.400,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Lebung Nala ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp.239.662.440,- atau sebesar 60% belanja modal, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp.159.774.960,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Lebung Nala dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

11. Tri Dharmayoga

Luas wilayah di Desa Tri Dharmayoga 445 Ha, dengan jumlah penduduk 1.427 jiwa dan 330 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.399.610.787,-

Proses penentuan program ADD di Desa Tri Dharmayoga ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiyai program – program yaitu: pembangunan gorong – gorong, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata krja sebesar Rp.159.844.314,- atau sebesar 40%, belanja pegawai sebesar Rp.239.766.472,- atau sebesar 60%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Tri Dharmayoga dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

12. Kemukus

Luas wilayah di Desa Kemukus 1.000 Ha, dengan jumlah penduduk 1.827 jiwa dan 625 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.414.214.878,-

Proses penentuan program ADD di Desa Kemukus ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiyai program – program yaitu: pembangunan gorong – gorong, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata krja sebesar Rp.165.685.951,- atau sebesar 40%, belanja pegawai sebesar Rp.248.528.926,- atau sebesar 60%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Kemukus dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

13. Wai Sidomukti

Luas wilayah Desa Wai Sidomukti 605 Ha, dengan jumlah penduduk 1.758 jiwa dan 471 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.404.908.837,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Wai Sidomukti ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.242.945.302,- atau sebesar 60%, belanja modal, pemangunan gorong-gorong sebesar Rp.161.963.534,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Wai Sidomukti dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

14. Karang Sari

Luas wilayah di Desa Karang Sari 2.460 Ha, dengan jumlah penduduk 3.413 jiwa dan 1.096 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.433.963.078,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Karang Sari ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, biaya listrik serta pergantian ban dinas sebesar Rp.303.774.154,- atau sebesar 70%, belanja modal, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan peningkatan kader posyandu sebesar Rp.130.188.923,- atau sebesar 30%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Karang Sari dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

15. Ketapang

Luas wilayah di Desa Ketapang 1.179 Ha, dengan jumlah penduduk 7.460 jiwa dan 1.897 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.432.062.183,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Ketapang ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka

perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.259.237.309,- atau sebesar 60%, tunjangan operasional, PKK, LPM, penyelenggaraan perencanaan desa, pembangunan air bersih, pembiayaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp.172.824.873,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Ketapang dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

16. Bangun Rejo

Luas wilayah di Desa Bangun Rejo 540 Ha, dengan jumlah penduduk 2.611 jiwa dan 776 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.410.394.098,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Bangun Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp.246.236.458,- atau sebesar 60% belanja

modal, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp.164.157.639,- atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Bangun Rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

17. Berundung

Luas wilayah di Desa Berundung 540 Ha, dengan jumlah penduduk 2.025 jiwa dan 604 KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.417.902.548,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Berundung ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.271.636.656,- atau sebesar 65%, tunjangan operasional, PKK, LPM, penyelenggaraan perencanaan desa, pembangunan air bersih, pembiayaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp.146.265.891,- atau sebesar 35%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepada Desa Berunding dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Lampung Selatan.

D. Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis 28 Maret 2018 – Jum'at 13 April 2018

Waktu : 09:00 – 11:00 WIB

Tempat : Kecamatan Ketapang

Narasumber : Sekertaris Kecamatan, Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa di Kecamatan Ketapang

Isi Laporan :

Kecamatan Ketapang terdiri dari 17 Desa, program kerja Desa di Kecamatan Ketapang tahun ini adalah melakukan perbaikan jalan. sarana dan prasarana desa merupakan instrument utama yang diperlukan dalam rangka membangun kesejahteraan desa, termasuk jalan. Jalan sebagai infrastruktur penting untuk menunjang lancarnya aktivitas transportasi. Mengingat banyaknya jalan pedesaan yang sehingga di tuntutan untuk segera melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu program kerja desa.

Banyaknya jalan yang rusak, sehingga tidak memungkinkan pemerintahan desa dan masyarakat melakukan perbaikan secara bersamaan dikarenakan dana desa yang sangat minim. Maka dari itu perbaikan dilakukan secara bergilir.

Dana Desa sendiri sebenarnya sangat membantu untuk kemajuan desa, dikarenakan banyak infrastruktur jalan banyak yang rusak, pengalokasian ADD lebih fokus pada pembangunan fisik dan operasional desa. Untuk program – program ekonomi kreatif untuk tahun – tahun belum bisa dilakukan dengan baik, karena setiap desa lebih fokus pada perbaikan jalan.

Dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, ADD belum dapat meningkatkan pendapatan, tetapi secara tidak langsung ADD meningkatkan pendapatan buruh, karena adanya pembangunan jalan yang bisa menjadi lapangan pekerjaan sementara bagi buruh atau masyarakat sekitarnya.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Program ADD 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Menurut Undang – Undang no 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat 1 (d) tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan lain – lain dana Desa yang sah diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dibagi untuk setiap Desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2016 pasal 10 tentang belanja Alokasi Dana Desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahn desa, pelaksanaan membangun desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas, ada 13 Desa dari 17 Desa di Kecamatan Ketapang yang belum sesuai pelaksanaanya, yaitu paling sedikit

70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahann desa, pelaksanaan membangun desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW. Tetapi dalam pelaksanaanya sebaliknya 30% untuk pembangunan Desa dan 70% untuk operasional Desa. Ini menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya ADD terhadap pendapatan masyarakat, sedangkan untuk 4 Desa lainnya meskipun dalam pelaksanaanya sesuai dengan peraturan pemerintah tetapi ADD masih kurang signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Pengelolaan ADD Pengaju pada asas:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (Misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, parsipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya persentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa di Kecamatan Ketapang di setiap desanya tahun 2017 berkisar antara Rp. 390.000.000,- sampai dengan Rp. 440.000.000,- per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang di berikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Sedangkan program untuk pembangunan alokasi dana desa di Kecamatan Ketapang yaitu untuk pembangunan, gorong – gorong, pembangunan rabat beton, drainase, pembangunan TPT Gerbang Gajah, untuk bantuan operasional lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk operasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan hanya 4 desa dari 17 desa yang programnya untuk pemberdayaan ekonomi yaitu desa Sri Pendowo, Pematang Pasir, Karang Sari, Bangun Rejo, namun belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Ketapang ini program dan pengalokasian dana desa masing – masing desa hanya berfokus pada gorong – gorong dan tunjangan untuk aparatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan sanitasi, yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditanggapi dengan baik.

Selain terkendala dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya difokuskan untuk operasional desa, belanja paratur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aparatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari presentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35% - 45%.

Diantara 17 desa di Kecamatan Ketapang yang paling baik diantara desa yang lain yaitu desa Sri Pendowo, karena selain baik secara administrative maupun pengelolaan di lapangan, baik pula dalam pembagian alokasi dana desa untuk masing – masing pos, seperti pembangunan fisik, bantuan lembaga masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun operasional desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Yang memiliki program pemberdayaan masyarakat yaitu di 10 desa yaitu: Sri Pendowo, Karang Sari, Bangun Rejo, Pematang Pasir, Ketapang, Sumur, Sumber Nadi, Ruguk, Sido Asih, Lebung Nala. Dan 7 desa lainnya yaitu: Kemukus, Taman Sari, Berundung, Tri Dharmayoga, Sidoluhur Wai Sidomukti dan Legundi ADD hanya digunakan untuk pembangunan fisik, belanja operasional desa dan BPD. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c, adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Ketapang, tujuan program alokasi dana desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur desa, dan peningkatan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial, ini terlihat dari program – program di desa yang di alokasikan untuk ibu – ibu PKK yang digunakan untuk pengajian.

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa prioritas dana desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan

pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk penggunaan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
 - b. Pengelolaan dan pembinaan posyanda
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan usaha tani
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
 - g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa

3. Pembangunan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi local didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Ketapang perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program
2. Perencanaan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dilingkungan pemukiman.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan aspirasi dan sumberdaya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun

masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirain berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Undang – undang RI Nomor 25 tahun 2015 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. Strategis, perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis berpengaruh terhadap pencapain visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan kesejahteraan dalam pendapatan masyarkat.
- b. Demokratis dan partisipasi, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemnagku kepentingan.

- c. Politik, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang – undang.

Pada umumnya pelaksanaan program ADD yang ada di Kecamatan Ketapang adalah pembangunan fisik desa, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana desa seperti perbaikan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan sarana kesehatan dan sarana pendidikan.

Dari beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa tujuan dari program Alokasi Dana desa di Kecamatan Ketapang ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan insfrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidaksesuain program yang disusun oleh pemerintahan desa setempat. Aparatur tidak memperiotaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program dari alokasi dana desa, aparatur desa lebih memperiotaskan pembangunan gorong – gorong dan kegiatan yang kurang produktif lainnya.

Adapun bisa kita lihat tabel dibawah ini pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan Ketapang.

NO	Desa	Pendapatan Tahun 2016	Pendapatan Tahun 2017
1	Sidoasih	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
2	Sumber Nadi	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
3	Sri Pendowo	Rp. 1.600.000	Rp. 1.700.000
4	Legundi	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
5	Taman Sari	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
6	Sidoluhur	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
7	Ruguk	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
8	Sumur	Rp. 1.500.000	Rp. 1.600.000
9	Pematang Pasir	Rp. 1.500.000	Rp. 1.700.000
10	Lebung Nala	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
11	Tri Dharmayoga	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
12	Kemukus	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
13	Wai Sidomukti	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
14	Karang Sari	RP. 1.400.000	Rp. 1.500.000
15	Ketapang	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
16	Bangun Rejo	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
17	Berundung	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa menunjukan alokasi dana desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Ketapang, kurang baik dalam perencanaan program dan pengelolaannya.

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat materil.

Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di Kecamatan Ketapang kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada beberapa desa yang menggunakan untuk kegiatan pemberdayaan yaitu: desa Sri Pendowo, Karang Sari, Pematang Pasir, Ketapang dan Bangun Rejo, yang memiliki program pemberdayaan masyarakat berupa kelompok tani, kelompok nelayan, keterampilan, kerajinan tangan oleh ibu PKK namun pengelolaannya belum dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan – pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Pelaksanaan Program ADD 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Pemerintahan desa sebagai pemberi kebijakan, dalam kaitan pada program ADD ini sangatlah penting.

Pendapatan masyarakat yang merata, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar

hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa:59

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa:59)

Menjelaskan adanya ketaatan kepada Allah SWT, Rasul dan Ulul Amri, ataupun pemimpin dalam hal ini yaitu pemerintah setempat. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dalam melaksanakan program ADD. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran penting dalam keberlangsungan pelaksanaannya di Kecamatan Ketapang dan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam peningkatan pendapatan.

Dalam keberlangsungan pelaksanaan program ADD yang baik menghasilkan sebuah peran yaitu adanya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendapatan. Adapun pendapatan masyarakat dalam islam adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan – aturan yang bersumber syari’at Islam. Pendapatn

masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa pelaksanaan ADD di Kecamatan Ketapang belum sepenuhnya terlaksana, hal itu berdasarkan indikator dan tujuan dalam ekonomi Islam adalah:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama kebijakan pembangunan insani. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasis kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharuriyat) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (kamaliyat) dan barang mewah (tahsiniyat).
3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan system jaminan sosial, dan pemeratan pendapatan, pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan berbagai sektor dan wilayah.

Dari data yang telah disajikan sebelumnya pemerintah desa di Kecamatan Ketapang belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan

amanah merangkul semua pihak dalam pelaksanaannya. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash:77)

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh – sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh – sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di muka bumi, karena dalam ayat AL-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakan jalan untuk

masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Jika melihat dari teori yang menjelaskan dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai, prinsip dan tujuan dasar dalam Ekonomi¹. Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa seharusnya menerapkan sistem Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful (*tanggung jawab sosial*).

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.



Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl:90)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil

¹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, h. 62

berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara Hak dan Kewajiban mereka.

Pemerintah Desa selayaknya adil dalam pembagian anggaran, adil bukan berarti sama rata tetapi melihat mana yang lebih prioritas untuk dianggarkan terlebih sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. banyak terdapat beberapa Desa yang kurang adil dalam pelaksanaannya.

- 2) Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS.An-Nisa:58)

Ayat diatas menegaskan bahwa, amanah tidak hanya menyangkut tentang urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik saja. Kata-kata adalah amanah, memperlakukan insane dengan baik itu juga amanah. Amanah merupakan tuntunan Iman dan khianat adalah salah satu kekafiran.

Sabda Rasulullah SAW menegaskan:

“Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Pemerintah desa dapat memanfaatkan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat agar menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

- 3) Tafakul (*tanggungjawab sosial*), adanya tanggungjawab sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

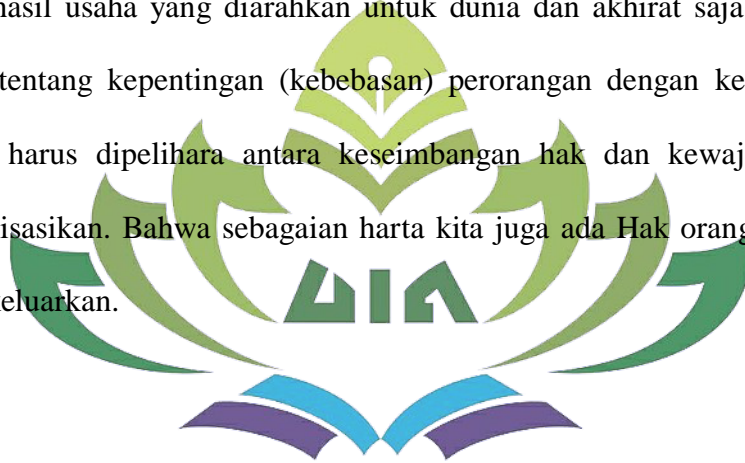
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah:195)

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih ketika telah ditunaikannya tanggungjawab sosial. Dalam ayat lain juga Allah juga telah melarang bagi manusia yang menimbun harta kekayaan, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara mereka.

Adanya rasa tanggung jawab sosial yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan hak dan kewajiban yang harus terealisasi. Bahwa sebagian harta kita juga ada Hak orang lain yang harus kita keluarkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1.) Pada pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2017 di Kecamatan Ketapang dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing – masing desa. Pada pelaksanaannya ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 10 tentang belanja Alokasi Dana Desa yaitu, ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahn desa, pelaksanaan membangun desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW. Tetapi pada pelaksanaannya malah sebaliknya. Sedangkan program ADD itu sendiri dalam peningkatan Pendapatan masyarakat berjalan kurang efektif, meskipun ADD setiap tahun meningkat. Selain dalam pelaksanaannya yang kurang baik,

anggaran yang sangat minim menjadi faktor yang kurang efesiennya Alokasi Dan Desa terhadap Pendapatan Masyarakat.

- 2.) Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Kecamatan Ketapang dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan nilai, prinsip dan tujuan sistem Ekonomi Islam yaitu : Keadilan, Pemerintah Desa selayaknya adil dalam pembagian anggaran, adil bukan berarti sama rata tetapi melihat mana yang lebih prioritas untuk dianggarkan terlebih sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. banyak terdapat beberapa Desa yang kurang adil dalam pelaksanaannya. Tanggung Jawab atau Amanah, Pemerintah desa dapat memanfaatkan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat agar menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup. dan Takaful (*Tanggung Jawab Sosial*), Adanya rasa tanggung jawab sosial yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan hak dan kewajiban yang harus terealisasikan. Bahwa sebagian harta kita juga ada Hak orang lain yang harus kita keluarkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah ataupun Instansi terkait memperhatikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan keuangan dana Desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan. Untuk pemerintah desa seharusnya program Alokasi Dana Desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa dan benar – benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab sosial untuk berperilaku ekonomi yang adil dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan untuk meningkatkan pendapatan secara umum bukan pendapatan secara pribadi atau kelompok tertentu saja. Diharapkan kedepan pemimpin – pemimpin bangsa ini lebih baik lagi dalam memikul beban berat yang di amanahkan masyarakat terhadap dirinya agar tercapai kemaslahatan umat (*falah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Wawancara dengan penulis*, Kecamatan Ketapang, 06 Februari 2018
- Anwar, M. Ahmad, *prinsip-prinsip metodologi research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 2000.
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arsyad, Loncolin, *Ekonomi pembangunan Edisis 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Badrudin, Rudi, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2003.
- Fair, Karl E. Case. Ray. C, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*, Erlangga Jakarta, 2007
- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach, jilid 1*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015
- I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, edisi 1, 2015.
- Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010.
- Kartono, Kartino, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFI, 2005), h. 313

Moersaleh dan Musanaf, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 2000.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007)

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 ayat 2.

Sudirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Lembaga penerbit fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Tambunan, Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, (Bogor: perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013.

Raharja, Pratama, *et.al, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

Undang-undang No 13 tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab 1ketentuan Umum pasal 1 Angka 31.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 & 4.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

JURNAL

Prabawa, Akbar, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggarongseberang Kutai Karta Negara*”. Jurnal Ilmu Pemeritah, (Desember 2015).

Novia, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa Studi di Desa Samongan Kecamatan Nayan Kabupaten Sangau” Jurnal Ilmu Sosiatri, Vol. No 3. 9 (September 2015).

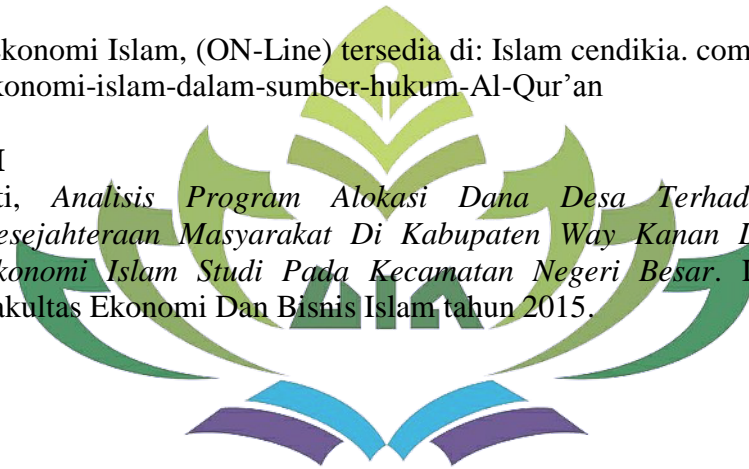
ONLINE

Abdurrahmah, Abu Uswah, “perencanaan Dalam Kaidah Islam” (on-line), tersedia di: <https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/> (14 April 2018).

Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: Islam.cendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur'an

SKRIPSI

Rosnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Kecamatan Negeri Besar*. Lampung Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tahun 2015.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

BLANGKO KONSULTASI

Nama : Deswandi

NPM : 1451010163

Pembimbing 1 : H. Supaijo S.H., M.H

Pembimbing 2 : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (2017) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)

No	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	12-03-2018	Perbaikan latar belakang masalah, cari teori yang berkaitan dengan judul		
2	19-03-2018	Perbaikan latar belakang masalah, cari data dari teori yang digunakan		
3	26-03-2018	ACC perbaikan proposal dalam penulisan		
4	27-03-2018	ACC Proposal, lanjut BAB I – BAB III		
5	16-04-2018	Perbaikan redaksional dan penulisan BAB I – BAB III		
6	17-04-2018	ACC BAB I – BAB III, Lanjut BAB IV – BAB V		
7	23-04-2018	Perbaikan BAB IV – BAB V, Analisis Data yang masih kurang dalam		

8	30-04-2018	Perbaikan BAB IV – BAB V, Perbaikan Kesimpulan dan Saran		
9	04-05-2018	ACC BAB IV – BAB V, Lanjut Pembimbing I		
10	18-05-2018	Perbaikan Abstrak dan Ayat- ayat pada teori terkait		
11	21-05-2018	Perbaikan Abstrak, Ayat- ayat, Kesimpulan dan Saran		
12	25-05-2018	Perbaikan Daftar Isi, Motto		
13	28-05-2018	ACC PA 1 Daftar Munaqosah		
14				



Bandar Lampung, 31 Mei 2018

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Supaijo, S.H., M.H
NIP.196503141994031002

Yulisti Devi, S.E.M.S.Ak

Daftar wawancara

Identitas wawancara

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :
- d. Alamat :
- e. Pekerjaan/jabatan :

Daftar pertanyaan

1. Berapa besaran dana desa di desa anda?
2. Penggunaan ADD digunakan untuk apa saja?
3. Berapa besaran presentase penggunaan dana tersebut?
4. Bagaimana proses penentuan program ADD di desa anda?
5. Program apa saja yang sudah dilaksanakan dari dana ADD untuk pemenuhan sarana prasarana untuk masyarakat?
6. Program apa saja yang sudah dilaksanakan dari dana ADD untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat?
7. Program apa saja yang sudah dilaksanakan dari dana ADD untuk lembaga masyarakat?
8. Bagaimana mekanisme pencairan ADD di desa anda?
9. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pengelolaan ADD di desa anda?

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari program pelaksanaan ADD di desa anda?
11. Apa saja mayoritas pekerjaan masyarakat di desa anda?
12. Berapa kisaran pendapatan masyarakat tiap bulan?

Pewawancara,

Responden

Deswandi
1451010163

.....









